

Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif dan Berkelanjutan

Sandy Ratna Puspitaningrum¹, Chotib², & Husnul Fitri Sundoko³

¹Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan

^{1,2,3}Kajian Pengembangan Perkotaan - Universitas Indonesia

¹sandy.salsika@gmail.com, ²chotib.m@ui.ac.id ³husnul.fitri20@ui.ac.id

DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.6096

Submitted: 2023-12-10, Revised: 2023-12-25, Accepted: 2023-12-27

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) direncanakan sebagai kawasan representatif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan bentuk transformasi budaya kerja yang extraordinary. Kawasan IKN menjadi model pembangunan kota-kota masa depan Indonesia menuju Indonesia yang adil dan makmur pada tahun 2045. Namun, perencanaannya harus berdasarkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan pembangunan IKN yang tidak hanya mengikuti kebijakan yang sedang tren tetapi dikaji secara mendalam dari segi kebutuhan pembangunan perkotaan yang inklusif bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan berdasarkan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa ruang-ruang interaksi sosial, bangunan publik, dan fasilitas yang disediakan menciptakan kohesi sosial sebagai representasi kemajuan bangsa. Kriteria pembangunan IKN didasarkan pada teori bentuk kota yang baik sebagai ukuran kinerja kota berdasarkan 7 dimensi kota yang baik. Dimensi-dimensi kota menjadi kriteria pembangunan perkotaan, yang menjadi acuan dalam merumuskan perencanaan IKN agar sesuai dengan tujuan dan harapan bersama kita untuk menyajikan kota yang inklusif bagi masyarakat.

Kata kunci: pemindahan ibu kota, IKN, good city form, dimensi kota

Abstract

The development of the Nation's Capital (IKN) is planned as a representative area for the implementation of government and a form of extraordinary work culture transformation. The IKN area is a model for the development of Indonesia's future cities towards a just and prosperous Indonesia in 2045. However, planning must be based on the real social and cultural conditions of Indonesian society. This research aims to examine the planning of the development of IKN that does not only follow a fashionable policy but is deeply studied in terms of the need of inclusive urban development for society. The research method in writing is qualitative and based on library research. The results show that social interaction spaces, public buildings, and the facilities provided create social cohesion as a representation of national progress. The criteria for the development of IKN are based on the good city form theory as a measure of city performance based on 7 dimensions of a good city. The dimensions of the city become criteria for urban development, which become a reference in formulating IKN planning so that it is in line with our common goals and hopes to present an inclusive city for the people.

Keywords: capital city relocation, IKN, good city form, city dimensions

Pendahuluan

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan nama Nusantara dan mengalami perubahan melalui UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU IKN dilakukan akibat kondisi Kota Jakarta yang sudah melebihi kapasitas dan mengkhawatirkan, serta unsur filosofis berupa pemerataan pembangunan dan penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pembangunan IKN akan menjadi "engine of growth" perekonomian di Pulau Kalimantan dan sekaligus sebagai "trigger" pemerataan pembangunan di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan ini akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam sistem perdagangan dunia, rantai pasok logistik, aliran investasi, dan pengembangan teknologi. IKN merupakan cermin perkembangan peradaban bangsa yang modern berupa kota yang hijau dan berkelanjutan melalui visi "Kota Dunia untuk Semua". Pembangunan IKN menjadi pemicu transformasi sosial dan budaya bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan IKN juga dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang kondusif serta pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia khususnya ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kepadatan penduduk dan kesenjangan sosial ekonomi yang kurang merata serta terkonsentrasi di Pulau Jawa berakibat tidak meratanya pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pemerataan ini menjadi isu yang penting karena perputaran uang negara hampir 70% berada di Jakarta, padahal luas Jakarta hanya 0,003% dari total luas daratan Indonesia (Ayundari, 2022).

Desain rencana IKN melalui konsep smart city dikembangkan dengan berbagai teknologi canggih pendukung di dalamnya. IKN yang diharapkan menjadi kota yang sangat megah sebagai simbol kemajuan bangsa dan menjadi kota terbaik di dunia. Impian untuk IKN agar menjadi kota yang paling berbahagia mengalahkan kota-kota terbaik di dunia. Hal tersebut tentu akan bertolak belakang apabila tidak melakukan elaborasi secara mendalam terhadap kondisi riil masyarakat baik secara sosial, budaya, dan perekonomian. Pembangunan IKN perlu memperhatikan aspek sosial perekonomian, aspek etik-humanisnnya, dan kesiapan SDM.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju perlu dilakukan secara transformatif. Menuju jalan kemajuan tidak hanya ditempuh dengan pendekatan simbolik berupa pembangunan infrastruktur dan kota-kota kelas dunia. Pembangunan IKN sebagai kota masa depan yang transformatif diharapkan dapat mendorong terwujudnya transformasi bangsa, yaitu transformasi berbangsa dan berbudaya, transformasi bekerja, transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi, dan transformasi bermukim. Tahapan-tahapan pembangunan perlu dikaji secara mendalam berbasis kondisi masyarakat sehingga transformasi yang diharapkan dapat terwujud.

Kondisi sosial perekonomian masyarakat Indonesia pada saat ini secara fundamental masih mengalami tekanan dan sulit keluar dari jebakan middle-income trap. Skenario

pertumbuhan ekonomi dengan fluktuasi pada setiap periode (5%, 4%, dan 3%), mengakibatkan Indonesia mengalami kesulitan untuk menjadi negara dengan kategori berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Kemiskinan yang dialami masyarakat dan kondisi kualitas SDM dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan pemerintah, apabila ingin mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia maju.

Upaya mendorong terwujudnya transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi melalui pembangunan IKN perlu dikaji ulang. Tujuan penerapan berbagai sistem teknologi dan fasilitas science and technology park di IKN sebagai pemicu terwujudnya transformasi masyarakat cerdas berbasis teknologi, akan sulit dicapai apabila tidak mampu menciptakan terwujudnya lingkungan inovasi dan pemulihan ekosistem TIK. Meskipun pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan di Asia, namun Indonesia lebih berperan sebagai konsumen teknologi daripada penghasil teknologi.

Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi pemicu terwujudnya perkotaan, permukiman, dan perumahan yang inklusif sebagai wujud transformasi bermukim. Pentahapan-pentahapan pembangunan perlu dipertimbangkan secara matang sehingga kehadiran IKN tidak menjadi faktor pemicu ketimpangan pembangunan perkotaan di Pulau Kalimantan dan terjadinya segregasi ruang perkotaan. Pembangunan IKN yang eksklusif dan revolusioner dapat menciptakan terjadinya segregasi sosial dan ruang perkotaan yang berdampak kepada peningkatan ketimpangan dan disintegrasi bangsa dan gagal menciptakan kota yang transformatif secara humanistik berdasarkan falsafah hidup berbangsa dan berbudaya.

Pendekatan-pendekatan pembangunan yang dilakukan di IKN perlu dikaji tidak sekedar jargon-jargon mengikuti fashionable policy dan theoretical concept, tanpa memperhatikan permasalahan mendasar di dalamnya, dalam jangka pendek menjadi beban perekonomian negara dan jangka panjang menciptakan ketimpangan dan disintegrasi bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tujuan penulisan ini adalah menganalisis bagaimana seharusnya pembangunan IKN dilakukan supaya menjadi perkotaan yang humanis dan transformatif bagi pembangunan menuju Indonesia maju, dengan menempatkan manusia dan SDM di dalamnya sebagai faktor utama.

Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat interpretasi dengan mengkompilasi dari banyak sumber literatur baik yang merupakan data primer maupun sekunder. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan IKN. Kajian ini dilakukan bersumber dari hasil kajian penyusunan jurnal akademik, pandangan dan opini para ahli yang memiliki kompetensi, maupun laporan

hasil survei dari berbagai pihak/instansi yang kredibel. Untuk memulai interpretasi data kualitatif, pertama-tama harus dipelajari segala sesuatu dari sudut pandang objek yang diteliti. Tulisan ini memiliki peran analisis kebijakan pemindahan ibukota, yang terutama difokuskan untuk perbandingan dan evaluasi berbagai strategi alternatif. Analisis ini ditujukan bagi aktor publik sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang timbul akibat kebijakan pemindahan ibukota yang diambil.

Tulisan ini mengacu pada dimensi kota dari buku *Theory of Good City Form* yang ditulis oleh Kevin Lynch dan membangun kota yang humanis dari konsep Jane Jacobs. Bentuk dan dimensi kota yang baik menurut (Lynch, 1984) dalam bukunya *Theory of Good City Form*, apabila kota tersebut dapat memenuhi kriteria dari vitality, sense, fit, access, dan control. Tiap-tiap kriteria tersebut sesuai dengan efficiency and justice, yaitu Meta Kriteria. Bentuk kota yang baik, harus terintegrasi secara baik dengan mengandung berbagai nilai-nilai di dalamnya. Hal tersebut penting untuk menjadikan kota tersebut mampu menjaga keberlangsungannya dan hubungannya dengan kota-kota lain. Bentuk kota yang baik senantiasa bersifat terbuka, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan waktu.

Aspek Penting Pemindahan Ibu kota Negara

Dari hasil penelaahan terhadap kajian-kajian dan literatur yang kredibel, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pemindahan ibukota negara adalah aspek sosio-budaya, aspek geografis, aspek geopolitik dan hankam, aspek ekonomi, teknologi dan lingkungan.

Pertama, aspek geografis. Presiden Joko Widodo menyampaikan lima faktor utama yang menjadi dasar pemilihan Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota Negara, yaitu: (Kominfo, 2019): (1) risiko bencana alam yang minimal. Kalimantan memiliki risiko bencana alam yang lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa, seperti banjir, kebakaran hutan, gunung berapi, tsunami, dan tanah longsor; (2) terletak di bagian tengah Indonesia, sehingga dapat dijangkau dengan mudah dari berbagai wilayah di Indonesia; (3) berdekatan dengan kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, sehingga dapat memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang sudah ada; (4) memiliki infrastruktur yang relatif lengkap, seperti jalan, bandara, dan Pelabuhan; dan (5) tersedia lahan yang luas seluar 180 ribu hektar dan dikuasai pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan IKN. Jika dianalisis lebih lanjut, kelima alasan tersebut lebih cenderung berbasis pada pertimbangan geografis (Purnama & Chotib, 2023).

Konsep pembangunan kota baru IKN adalah Indonesia Sentris, mencakup pembangunan nasional yang bukan hanya dipusatkan di Pulau Jawa, melainkan dapat merata di seluruh Indonesia tanpa adanya disparitas. Letak Kalimantan secara geografis berada di tengah-tengah Indonesia menjadi simbol semangat untuk mewujudkan visi

Indonesia sentris dalam pembangunan ke depan. Sebagai representasi keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kedua, aspek ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Pemindahan IKN Nusantara adalah upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian yang inklusif, karena IKN menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru yang akan menyebar ke luar dari Pulau Jawa. Dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke provinsi yang memiliki konektivitas baik dengan provinsi lain, potensi untuk meningkatkan arus perdagangan di lebih dari 50% wilayah Indonesia dapat terwujud. Selain itu, tindakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperluas skala perdagangan di luar Pulau Jawa. Ini akan menciptakan peluang investasi di Ibu Kota Negara dan provinsi sekitarnya, serta menghasilkan diversifikasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan nilai tambah pada sektor non-tradisional. diberbagai provinsi diluar Pulau Jawa.

Pada aspek teknologi dan lingkungan, pemerintah berkeinginan agar pembangunan IKN diarahkan pada konsep modern yang mengintegrasikan teknologi canggih dan berwawasan lingkungan. Pembangunan ibu kota baru diharapkan dapat menjadi pelopor dalam efisiensi energi, inovasi dan kreativitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan. IKN akan mengusung gaya hidup rendah karbon yang efisien, fokus pada transportasi umum, menciptakan lingkungan perkotaan yang mendukung pejalan kaki, dan menjaga kelestarian alam. Mampu berkelanjutan dalam segala aspek, mulai dari metode konstruksi berkelanjutan, desain yang lebih hemat energi, pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam sistem jaringan, hingga manajemen sampah yang berkelanjutan.

Ketiga, aspek sosiologi dan budaya. Bappenas melakukan penelitian menyeluruh mengenai gaya hidup dan kondisi kehidupan masyarakat setempat, melibatkan aspek-aspek sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang membentuk identitas dan pola kehidupan mereka. Mereka menganalisis potensi masalah dan konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat relokasi dan adanya IKN terhadap masyarakat setempat. Pemerintah merumuskan prinsip-prinsip panduan kebijakan sosial dalam rangka pembangunan IKN. IKN sebagai kota metropolitan diperkirakan akan meningkatkan peluang usaha dan pekerjaan, namun juga berpotensi menjadi pemicu konflik sosial dan kerawanan antar kelompok etnis. Pemindahan IKN diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kalimantan, sambil mencegah terpinggirkannya masyarakat lokal oleh pendatang. Pemindahan ASN ini diproyeksikan akan melibatkan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, dengan perkiraan jumlah mencapai 1,5 juta orang mendiami kawasan tersebut di masa depan. Harapan masyarakat adalah terwujudnya Pencapaian kesetaraan dalam kehidupan sehingga seluruh masyarakat Kalimantan dan, secara lebih umum, Indonesia dapat menikmati manfaat pembangunan IKN.

Pembangunan IKN: Kota Masa Depan Transformatif

Membangun ibu kota baru sebagai embrio kehidupan berbangsa dan bernegara secara transformatif tahap demi tahap tanpa meninggalkan akar budaya dan kehidupan berbangsa. Ibu kota baru dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi real kehidupan berbangsa secara transformatif menuju cita-cita kehidupan masa depan yang diinginkan. Beberapa prinsip transformasi yang dimaksud yaitu: transformasi bekerja, transformasi berbangsa dan berbudaya, transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi, dan transformasi bermukim.

Pembangunan IKN diharapkan dapat meningkatkan budaya kerja aparatur pemerintah dengan sistem pengawasan yang terintegrasi. Perpindahan ibu kota di harapkan dapat merubah cara bekerja dan sistem bekerja yang selama ini kurang produktif menjadi lebih cepat, mengayomi, dan melayani. Nilai-nilai dasar Pancasila, kegotong-royongan, kejujuran, etos kerja, sikap toleransi, menjaga kehormatan dan martabat harus menjadi landasan budaya kerja. Ego sektoral yang membudaya dalam bekerja antar kementerian dan instansi menjadi penghambat bagi terwujudnya rencana besar bersama kehidupan bernegara. Transformasi bekerja harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa secara bertahap berdasarkan kondisi yang ada.

Transformasi berbangsa dan berbudaya perlu didorong dalam kondisi prinsip-prinsip ideologi Pancasila sebagai landasan negara dan perspektif kehidupan, menjadi kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan politik dan sosial mengalami penurunan signifikan sejalan dengan pengaruh yang semakin kuat dari arus globalisasi serta paham-paham radikalisme serta ideologi lainnya yang semakin berpengaruh terhadap cara berpikir dan perilaku masyarakat Indonesia (Siswanto, 2017). Pembangunan fasilitas ruang-ruang yang mencerminkan budaya nusantara di panggung nasional, lambang-lambang kemajuan bangsa yang menjadi perhatian bagi dunia, ruang publik, dan sarana edukasi perlu diwujudkan di kawasan IKN. Ibu kota negara sebagai bentuk transformasi berbangsa dan berbudaya jangan hanya di peruntukkan untuk kelompok dan golongan tertentu. IKN harus memperhatikan aksesibilitas yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dengan tetap memperhatikan pertahanan dan keamanan nasional.

Transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas merupakan agenda utama pengembangan IKN. Beberapa fasilitas yang akan dikembangkan adalah: (1) Science and technology district berupa fasilitas technology park, indonesia's center of excellence, nerves center and innovation center, dan lainnya; (2) Infrastruktur masa depan yang cerdas berupa autonomous car and logistic, infrastruktur terintegrasi dengan dukungan teknologi, cable car, logistic tunnel, drone delivery, dan lainnya; dan (3) Green and smart mobility berupa data gathering sensor, mobility command center, dan future mobility and system.

Transformasi bermukim yang akan dikembangkan di kawasan IKN perlu mengedepankan pendekatan smart living. Mewujudkan compact living yang terintegrasi dengan sistem transportasi perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat.

Perlunya Pendekatan Humanistik yang Inklusif dan Transformatif

Secara konsep dan pendekatan, pembangunan IKN sudah berupaya melakukan elaborasi tematik berdasarkan kondisi geografis dan falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Konsep futuristik yang ditawarkan juga sebagai bentuk semangat kemajuan bangsa di masa depan yang akan menjadi percontohan pembangunan kota-kota di Indonesia. Namun yang perlu diperhatikan adalah belum adanya kajian pendekatan pentahapan pelaksanaan pembangunan secara transformatif. Kondisi sosial dan budaya bangsa Indonesia harus menjadi penentu pentahapan pembangunan yang harus dilakukan. Pembangunan IKN dengan berbagai mimpi futuristik yang ditawarkan tanpa memperhatikan transformasi sosial, budaya, ekonomi akan memberikan dampak negatif yang luar biasa. Fasilitas yang disediakan akan tidak efektif apabila tidak didasarkan pada perubahan sosial, budaya, dan perekonomian secara transformatif.

Kegagalan pembangunan ibukota di negara negara lainnya perlu dijadikan rujukan, khususnya yang mengalami kegagalan secara mendasar. Salah satu yang menjadi simbol kegagalan pembangunan ibukota baru adalah Negara Brazil pada saat pemindahan pusat pemerintahan dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Keputusan pemindahan ke Brasilia semakin memperparah keadaan ekonomi di Brazil dan menimbulkan banyak permasalahan setelah beberapa tahun (Kelly, 2020). Pembangunan Brasilia mengalami kegagalan karena mengabaikan prinsip pembangunan kota dari sisi humanistik. Mendesain ibu kota baru yang penekanannya untuk mobil, bangunan, tapi mengabaikan sisi kemanusiaannya, akan mengalami berbagai permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hunian bukan menjadi pertimbangan utama perencanaan grand desain dan pentahapan pembangunan Brasilia. Kehidupan di ibukota baru tidak menjadi perhatian dan titik berat gagasan perencanaan. Namun Brasilia di desain lebih kepada faktor bangunan, infrastruktur, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Faktor humanistik cenderung diabaikan dan komunitas yang seharusnya menjadi pemilik kota tidak terbentuk sehingga kota gagal bertumbuh dan berkembang sesuai dengan yang dicita-citakan.

Pengembangan IKN dengan tujuan menciptakan kawasan kebanggaan melebihi kawasan-kawasan ibukota lainnya di negara lain harus dikembalikan kepada tujuan awalnya. Ibu Kota negara di pindahkan karena memiliki 3 (tiga) misi utama, yaitu (1) Daya dukung dan daya tampung Kota Jakarta yang sudah melebihi kapasitas untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang kondusif; (2) Pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia; dan (3) Transformasi Bangsa. Untuk itu pembangunan ibukota seharusnya

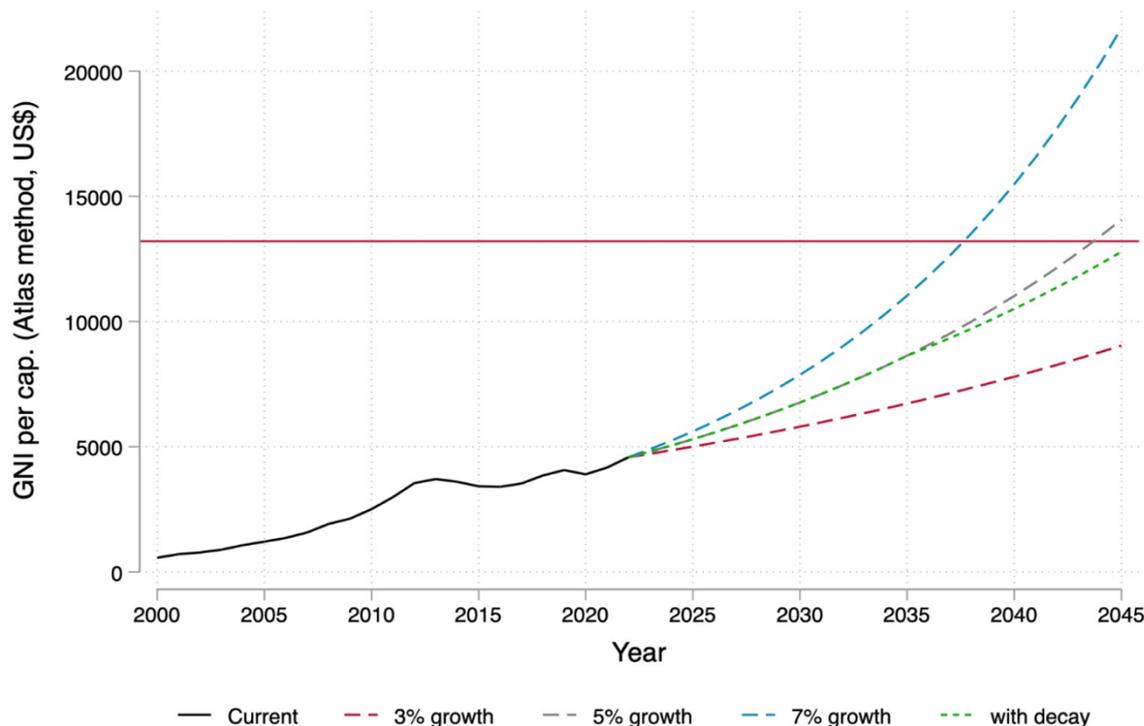
diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan aspek lainnya bukan hanya sekedar menjadi “proyek mercusuar” dengan mengabaikan urgensi kebijakan-kebijakan lainnya.

Menuju Indonesia Maju secara Transformatif

Menuju jalan kemajuan tidak hanya ditempuh dengan pendekatan simbolik berupa pembangunan infrastruktur dan kota-kota kelas dunia. Jalan kemajuan perlu memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Indonesia dapat terperangkap pada middle income trap. Berdasarkan analisis negara lain apabila dibandingkan dengan Indonesia, menunjukkan Indonesia kurang mencapai kriteria yang diperlukan dan cukup untuk mencapai status negara yang tinggi pendapatannya, misalnya yang dialami oleh Cina, Brasil, Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia pada masa awal mencapai kategori Pendapatan Menengah Atas.

Penting bagi pemerintah untuk memusatkan perhatian pada pembangunan kelas menengah yang tangguh dan inovatif, mengingat peran kelas menengah sebagai penggerak utama pembangunan jangka panjang. Alih-alih terfokus pada aspirasi menjadi negara maju, disarankan agar pemerintah lebih berfokus pada upaya mengatasi kemiskinan, mengurangi ketidakesetaraan, mempromosikan kesempatan yang setara, dan membangun kelas menengah yang kokoh, tahan lama, dan inovatif menjadi fokus utama. Secara historis, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 hanya mencapai 5,3%, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada periode 1980 sampai dengan tahun 1996 mencapai 6,4%, yang ditandai oleh kemajuan pada sektor industri manufaktur dan terjadinya liberalisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode 1968 sampai dengan tahun 1979 mencapai 7,5% (Hidayat et al., 2018). Sesuai data historis pertumbuhan ekonomi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan angka pertumbuhannya seperti pada masa tahun 1968-1996, dengan angka pertumbuhan 6% - 7,5%.

Gambar 1: Proyeksi GNI Per-Capita Indonesia pada tahun 2023-2045



Sumber: (Nuryakin et al., 2023)

Catatan:

- * Dengan proyeksi penurunan, pertumbuhan ekonomi diantisipasi mencapai 5% hingga tahun 2035, diikuti pertumbuhan sebesar 4% dari tahun 2035 sampai 2040, serta pertumbuhan ekonomi 2041 sampai 2045.
- * Bank Dunia mengelompokkan negara-negara berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita:
 1. Lower Income Countries (LIC) sebagai kategori negara berpendapatan rendah : < US \$ 1,136
 2. Lower Middle-Income Countries (LMIC) sebagai kategori negara berpendapatan menengah bawah : US \$ 1,136 - US \$ 4,445
 3. Upper Middle-Income Countries (UMIC) sebagai negara berpendapatan menengah atas: < US \$ 4,446 - 13,385
 4. High Income Countries (HIC) sebagai negara berpendapatan tinggi; > US \$ 13,846.

Nuryakin et al., 2023, menggambarkan berbagai macam skenario dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Dengan asumsi bahwa Pendapatan Nasional Bruto per kapita untuk negara berpendapatan tinggi sebesar US\$13.846 pada tahun 2023 dan pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto per

kapita sekitar 5% per tahun (sebanding dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%), Indonesia diproyeksikan dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2044. Indonesia akan mencapai kategori negara berpendapatan tinggi pada tahun 2038, jika pertumbuhan GNI per kapita mencapai 7% per tahun, meskipun hal itu dianggap sulit untuk dicapai. Skenario pertumbuhan dengan fluktuasi pada setiap periode (5%, 4%, dan 3%), Indonesia kemungkinan besar tidak dapat menembus status HIC pada tahun 2045. Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan sejak melewati batas negara berpendapatan menengah atas (UMIC) hingga tahun 2022 yaitu Cina 6,7%, Thailand 2,18%, Malaysia 2,94%, Korea Selatan 4,59%, dan Brasil 1,13%.

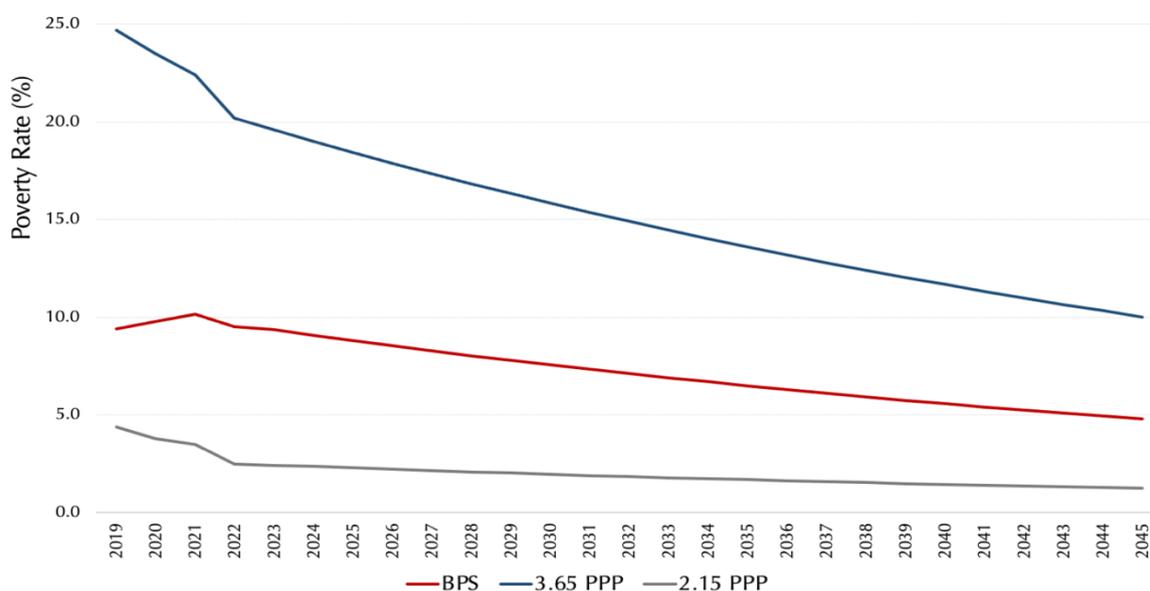
Mimpi Kemajuan di Tengah Kemiskinan

Skenario menuju Indonesia Emas 2045 banyak berfokus pada upaya mencapai status negara berpendapatan tinggi, namun terlupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kondisi kehidupan masyarakat kategori miskin serta mewujudkan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan mencapai 9,36% (BPS, 2023), angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan selama 10 tahun terakhir bila dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 11,25%.

Menurut (Nuryakin et al., 2023) gambar 2 menggambarkan bahwa sulit untuk mencapai angka 0% kemiskinan di Indonesia pada tahun 2045 (ukuran kemiskinan BPS (US\$ 2,15) maupun Bank Dunia (US\$ 3,65)). Upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami stagnasi akibat sebagian besar di antaranya merupakan masyarakat dengan kategori miskin kronis. Dalam penelitian yang dilakukan pada rumah tangga, sekitar 22,5% RT miskin pada tahun 1993 masih dalam kondisi miskin hingga tahun 2014. Fenomena kemiskinan yang dinamis dan tingkat kerentanan rumah tangga di Indonesia membuat pencapaian impian untuk mencapai tingkat kemiskinan 0% menjadi suatu tantangan yang sulit untuk direalisasikan.

Obsesi berlebihan terhadap pembangunan IKN dan perubahan arah kebijakan penyaluran sumber daya untuk mewujudkan impian Indonesia menjadi negara kaya pada tahun 2045 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi yang cukup besar pada sektor padat modal, bukan padat karya yang lebih banyak menyerap tenaga kerja. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada pengurangan kemiskinan secara signifikan, terutama jika sektor-sektor yang menjadi motor pertumbuhan tidak melibatkan secara aktif kelompok miskin dan rentan.

Gambar 2: Proyeksi Kemiskinan tahun 2024-2045



Sumber: (Nuryakin et al., 2023)

Kesiapan SDM untuk Menyambut Kemajuan

Dalam buku laporan white paper dari LPEM FEB UI (Nuryakin et al., 2023) menyampaikan bahwa sejak pertengahan tahun 2000-an, pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan sektor pendidikan, dari sekedar peningkatan akses pendidikan menuju peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Walaupun telah diimplementasikan berbagai kebijakan dan meningkatnya anggaran Pendidikan setiap tahunnya, namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai harapan. Sejak tahun 2000, Indonesia telah bersungguh-sungguh terlibat dalam Program for International Student Assessment (PISA) untuk mengukur pencapaian perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahunnya dan melihat perbandingannya dengan negara lain. Namun hasil yang dicapai belum optimal, pada kategori kemampuan membaca yang menunjukkan tren positif, mengalami penurunan seperti pada tahun 2018. Pada kategori kemampuan matematika dan sains juga mengalami stagnasi selama duapuluh tahun terakhir. Apalagi diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19, pada tahun 2022 pun akan mengalami penurunan lebih lanjut

Kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah dan juga mengalami ketidaksetaraan yang signifikan antar daerah. Siswa kelas 9 (tingkat 3 SMP) hanya dapat memberi jawaban sekitar 35,6% soal matematika yang paling dasar. Hanya sekitar 28-40% siswa berusia 15 tahun dapat mencapai tingkat kemampuan matematika yang minimal. Pemerataan

pendidikan juga masih belum optimal bila merujuk hasil ujian nasional pada tahun 2017, prestasi siswa SMP Jawa Tengah (Brebes) Sumatera Utara (Labuhan Batu Selatan), mengalami keterlambatan lebih dari 2 tahun jika dibandingkan dengan siswa SMP di Jawa Timur (Jombang dan Banyuwangi). Demikian halnya dengan prestasi siswa SMP Sulawesi Tengah (Donggala) bila dibandingkan dengan siswa SMP di Kota Malang mengalami keterlambatan lebih dari 5 Tahun.

Pada tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Indonesia masih terkendala dengan rendahnya partisipasi anak, khususnya pada kelompok usia 0-2 tahun (dalam Taman Penitipan Anak (TPA) sebesar 0,9%, kelompok usia 3-4 tahun sebesar 21 %, dan kelompok usia 5-6 tahun kategori pendidikan pra-sekolah sekitar 73%. Investasi Indonesia di dalam Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih dianggap kurang memadai. Indonesia termasuk negara yang mengalokasikan dana terendah pada sektor pendidikan usia dini, jika dibandingkan dengan negara-negara OECD. Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif di Indonesia hanya sekitar 0,04% (seharusnya 1% sesuai rekomendasi OECD) dari total Produk Domestik Bruto pada tahun 2020.

Demikian halnya pada sector Kesehatan belum optimal dalam memberikan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat. Kondisi sumber daya dan infrastruktur kesehatan di Indonesia menunjukkan tingkat keragaman yang mencolok. Hanya 48,9% puskesmas yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan (nakes) yang sesuai dengan standar pada tahun 2021. Transformasi sosial, ekonomi, dan budaya masih mengalami tantangan berat secara struktural (Nuryakin et al., 2023).

Ekosistem TIK Indonesia dan Ketimpangan Pembangunan Perkotaan

Dalam (Nuryakin et al., 2023) menyampaikan bahwa Indonesia termasuk sebagai negara yang cukup signifikan di wilayah ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi digital. Berdasarkan kajian yang dirilis e-Conomy SEA pada tahun 2020, ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 22% dengan transaksi mencapai USD 77 miliar. Proyeksi tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor e-commerce Indonesia diharapkan mampu mencapai transaksi sebesar USD 95 miliar dan tumbuh sebesar 17% (Compounded annual growth rate (CAGR). Meskipun pertumbuhan ini memberikan indikasi optimisme terhadap kemajuan ekonomi nasional, perlu diingat bahwa kalkulasi ini tidak mencerminkan peningkatan nilai tambah hanya berdasarkan pada angka penjualan.

Pada aspek infrastruktur jaringan, kecepatan unduh internet di Indonesia masuk dalam kategori rendah di ASEAN, berdasarkan laporan Ookla, kecepatan unduh internet di Indonesia hanya mencapai 20,17 Mbps (Bestari, 2023). Daya saing digital Indonesia masih sangat rendah, menempati peringkat 51 dari 63 negara, masih jauh dibawah Thailand dan Malaysia (peringkat ke-31 dan peringkat ke-40). Indonesia juga masih mengalami

permasalahan pada isu perlindungan data dan keuangan digital. Keadaan geografis juga menjadi kendala kemajuan ekonomi digital di Indonesia yang berkarakteristik kepulauan. Hal ini mengakibatkan adanya disparitas tingkat digitalisasi di berbagai daerah, rendahnya keterampilan digital, dan kurangnya inovasi di kalangan pelaku industri. Berbagai masalah ini berkontribusi pada Indonesia yang lebih berperan sebagai konsumen teknologi daripada penghasil teknologi.

Pembangunan technology park telah menjadi a fashionable policy dan secara prinsip tidak selalu berorientasi kepada fasilitas. Belajar dari pengembangan kawasan-kawasan serupa di luar negeri, pengembangan technology park cenderung mengalami kegagalan akibat kawasan tidak berhasil menciptakan inovasi-inovasi baru yang bersumber dari lingkungan inovasi yang sejati. Peran universitas sebagai pencetak inovator-inovator secara integratif dengan kawasan harus menjadi prasyarat terwujudnya technology park yang berkelanjutan.

Mengutip dari buku *Technopoles of the World* karya dari (Castells, 1994), Sophia-Antipolis, di dekat Nice, adalah contoh klasik dari "A Technopolis" bahkan sebagai "The European Smart Site". Sophia Antipolis pada awalnya adalah usaha swasta yang diambil alih oleh Negara pada akhir 1970an dengan peningkatan Investasi hingga tujuh kali lipat antara tahun 1982 dan 1989. Sophia-Antipolis sukses di satu tingkat karena berhasil membuat kawasan yang berkembang dan cenderung prestige dengan harga lahan dan harga sewa yang tinggi, diisi perusahaan-perusahaan besar, tetapi sejauh ini ia belum berhasil menciptakan lingkungan inovasi yang sejati. Berbeda dengan "Cambridge phenomenon" yang berkembang dan telah sejajar dengan Silicon Valley, dan menjadi citra atau simbol dunia inovatif di seluruh dunia. Cambridge phenomenon menjadi menarik adalah bahwa kejadian itu terjadi di tempat yang agak tidak terduga. Cambridge terletak 50 mil (80 kilometer) utara-utara-timur London, di East Anglia: wilayah yang hingga tahun 1960-an, dianggap sebagai pedesaan terpencil, tetapi tiba-tiba menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat Inggris. Keberhasilan kawasan ini berkembang akibat terwujudnya hubungan kawasan dengan universitas yang ada disana sebagai pencetak inovator-inovator yang berkontribusi menciptakan lingkungan inovatif di kawasan.

Pengembangan kawasan IKN harus belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mengembangkan kawasan yang serupa. Pembangunan fasilitas tanpa memperhatikan SDM dan lingkungan inovatif itu sendiri akan mengakibatkan kegagalan pengembangan kawasan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Penerapan autonomous dan smart logistic didalam kawasan harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang ada sehingga rancangan desain sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Kota baru yang berkembang didorong dua faktor utama, yaitu spekulasi tanah oleh pengembang swasta dan pemberian izin tanah yang tidak terkendali untuk pembangunan perumahan. Akibatnya, pengalihan kepemilikan tanah secara besar-besaran dari pemilik tanah sebelumnya, utamanya dari petani miskin yang terpaksa memberikan tanahnya kepada

para pengembang kota baru yang didukung oleh pemerintah pada saat itu, dengan atau tanpa rugi yang adil. Mereka kemudian harus mencari mata pencaharian baru. Pengembang bersaing menguasai lahan secara spekulatif dengan dukungan birokrasi pemerintah yang cenderung tidak transparan. Pemanfaatan lahan di pinggiran kawasan metropolitan seringkali diwarnai oleh 'konflik' antara masyarakat pemilik lahan, pengembang, serta pemerintah daerah yang berujung dengan penggusuran penduduk yang telah lama tinggal di wilayah tersebut.

Ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih terkendala oleh keterbatasan fiskal pemerintah dan besarnya backlog dalam kepemilikan dan penghunian tempat tinggal. MBR yang bekerja di pusat kota menghadapi tantangan untuk mendapatkan hunian di area tersebut dengan akses yang terbatas. MBR cenderung mendiami ruang-ruang minor di perkotaan, yang berada di antara perumahan eksklusif. Pilihan tempat tinggal di kawasan-kawasan tersebut diambil oleh MBR karena dekat dengan tempat kerja atau peluang mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor informal. Lingkungan dan kualitas tempat tinggal dianggap tidak terlalu krusial bagi MBR, selama masih bisa mendukung kehidupan. Hak-hak kepemilikan terutama hak milik atas tanah dan bangunan dianggap kurang signifikan, yang lebih esensial bagi mereka adalah dapat tetap tinggal tanpa dipaksa meninggalkan atau digusur, sesuai dengan pandangan mereka bahwa tempat tinggal merupakan suatu fasilitas yang mendasar.

Kriteria Pembangunan IKN yang Inklusif dan Humanis

Beberapa kriteria perlu menjadi perhatian yaitu dimensi vitality, dimensi sense, dimensi fit, dimensi akses, dan dimensi control. Pertama dimensi vitality. Kinerja vitality IKN yang baru diwujudkan untuk memastikan aspek-aspek yang menunjang ketahanan manusia dalam kehidupan perkotaan dan lingkungan huniannya. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas sebagai pembentuk struktur kota harus memiliki kinerja yang handal melalui aksesibilitas dan konektivitas dengan transportasi dan mobilitas berkelanjutan, infrastruktur ICT dan cerdas, infrastruktur kawasan, dan lainnya. Menciptakan ruang fisik kota berupa zoning settlement, network, dan terintegrasi dengan struktur kota. Mewujudkan kualitas lingkungan, dan akses universal terhadap fasilitas dasar. Sesuai dengan theory of good city form, upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan performance dimensi IKN pada aspek vitality untuk memenuhi standar untuk hidup dan berkehidupan khususnya pada kriteria sustenance (diantaranya terkait kualitas, ketersediaan serta kecukupan air, udara, makanan, dan energi).

Kedua, dimensi sense berperan penting sebagai ukuran bentuk kota yang baik. IKN sebagai pusat pemerintahan direncanakan dengan citra Indonesia sentris. Struktur IKN di rencanakan dipadukan dengan falsafah bangsa Pancasila dan fungsi pemerintahan sebagai trias politika. Pembentukan sumbu aksis dan hubungan peran fungsi eksekutif merangkul

legislatif dan yudikatif akan meningkatkan kinerja dimensi sense kota secara kuat. Aspek sense terkait kongruen dengan merencanakan kesesuaian antara struktur ruang dan struktur bukan ruang terlihat dari harmonisasi perletakan dan integrasi masterplan yang telah direncanakan. Kinerja aspek sense pada transparency bisa diperkuat dengan merencanakan ruang-ruang interaksi sosial dan komunitas dengan tujuan terwujudnya proses sosial dan alami yang terjadi di kawasan.

Ketiga dimensi fit. IKN selayaknya juga dikembangkan dengan melihat keserasian antara perilaku dan aktivitas sehari-hari masyarakat dengan situasi dan kondisi ruang yang mewadahi aktivitas tersebut. Hal ini secara teori merupakan upaya-upaya terencana dalam meningkatkan kinerja dimensi fit perkotaan. Perencanaan ruang publik tidak selalu harus dibangun dengan spektakuler dan mewah namun yang paling penting adalah dapat dipergunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan interaksi sosial antar masyarakat. Pembagian ruang dan zonasi disesuaikan dengan fungsi dan kegiatan kawasan yang direncanakan. Zona hunian harus memperhatikan perilaku masyarakat Indonesia dan karakteristiknya. Masyarakat Indonesia yang cenderung guyub dan berkarakteristik sosial yang tinggi dengan tradisi dan budaya serta keagamaan harus terwadahi dalam perencanaan ruang dan zonasinya. Masyarakat Indonesia dengan adat ketimuran sangat menjunjung nilai-nilai agama serta budaya dan harus memperhatikan hirarki ruang-ruang private dan publik. Masyarakat Indonesia cenderung sering mengadakan acara-acara bersama seperti pengajian, ibadah, pesta adat perlu di wadahi dalam rencana ruang khususnya hunian.

Masyarakat Indonesia juga memiliki sosialisasi yang tinggi antar tetangga dan cenderung hidup guyub satu dengan yang lainnya. Pemisahan secara jelas antar kelompok masyarakat akan merusak tatanan budaya dan tradisi yang telah bertahan berabad-abad. Masyarakat kita juga memiliki sifat gotong-royong dan sering bercengkerama sebagai bentuk interaksi sosial baik formal maupun non formal. IKN sebagai representasi seluruh budaya seoptimal mungkin harus mampu menjawab kebutuhan pelestarian dan peningkatan budaya dan karakteristik masyarakat Indonesia.

Keempat, dimensi access pada pembangunan IKN merupakan aspek yang sangat vital yang warganya memperoleh akses yang sangat mudah di segala bidang pekerjaan, pendidikan, transportasi, dan arus informasi. Transportasi dan telekomunikasi merupakan asset sentral daerah perkotaan sebagai bentuk ukuran. Kemudahan akses masyarakat terhadap seluruh layanan merupakan bentuk kinerja dimensi akses. IKN sebagai suatu transformasi kehidupan berbangsa dan berbudaya akan menekankan kepada kemudahan akses terhadap seluruh fasilitas dan layanan yang tersedia. Pengembangan sistem transportasi dan mobilitas cerdas yang berkelanjutan, sistem jaringan jalan yang terintegrasi, konektivitas darat, laut dan udara, pengembangan kota cerdas dan kemudahan akses informasi, dan kemudahan layanan lainnya menjadi upaya-upaya peningkatan kinerja access ibu kota negara baru.

Kelima dimensi control. Suatu kota dapat dikatakan baik, apabila memiliki pengontrolan yang pasti, responsif, serasi dengan penghuninya (baik untuk konteks waktu saat ini, maupun yang akan datang), dan sesuai dengan struktur permasalahan yang ada di lokasi tersebut. Ukuran-ukuran yang menentukan dan mempengaruhi suatu pengontrolan, bergantung pada konteks sosial & lingkungan dari tiap-tiap permukiman. Hal ini terjadi melalui proses pembinaan pada pelaksanaan good governance pada tingkat kota. Proses itu terjadi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis dan budaya masyarakat yang menciptakan kondisi perkembangan good governance dapat terjadi dengan baik. Faktor leadership sangat menentukan kinerja dimensi control dapat terwujud dengan melakukan pengontrolan secara cermat dan efektif dalam menentukan suatu penegasan, penyesuaian, toleransi dan adaptasi.

Apabila pengontrolan tidak cermat, maka yang akan terjadi adalah melemahnya fungsi kontrol, dan berdampak pada terjadinya sejumlah penyimpangan atas sejumlah aturan dan norma yang telah ditetapkan. Hal-hal tersebut juga terkait erat dengan peran dari pangkat, jabatan, kekuatan dan pengaruh sejumlah pihak di dalam suatu lokasi tertentu. Selain peningkatan SDM, dimensi control juga di dukung oleh sistem teknologi dan komunikasi dalam mendukung peningkatan pengontrolan yang responsif dalam menyediakan layanan bagi masyarakat. Penyediaan layanan sistem terpusat dengan dukungan data gathering sensor, mobility command center, integrated system, dan lainnya akan meningkatkan dimensi pengontrolan pada berbagai akses.

Selain itu, perlu juga prinsip efisiensi dan justice perlu dipertimbangkan. Efisiensi adalah suatu ukuran standar keseimbangan yang menghubungkan tingkat keberhasilan pada beberapa kinerja tertentu dengan suatu kegagalan pada beberapa kinerja yang lain. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai suatu keseimbangan antara sesuatu yang dikeluarkan. Tolak ukurnya bisa bermacam-macam, diantaranya adalah terkait korelasi antara biaya dengan nilai-nilai tertentu. Efisiensi juga berhubungan dengan persoalan lingkungan, penggunaan dan pengolahan energi, sumber-sumber materi, kinerja politik, dan dampak-dampak serta sejumlah manfaat terkait suatu kondisi psikologi tertentu. Untuk menjaga agar prinsip efisiensi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu instrumen untuk melindunginya. Instrumen tersebut adalah nilai keadilan. Nilai tersebut terkait erat dengan persoalan keseimbangan & persamaan hak maupun kewajiban bagi tiap-tiap orang, terkait hubungannya didalam suatu masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Pada prakteknya, keadilan juga terkait dengan penentuan batas-batas kebebasan dalam bertindak dan penegakan hukum dalam menjaga hak individu, kelompok dan kepentingan. Pengembangan kota cerdas, smart governance and society, infrastruktur cerdas, kerakyatan cerdas melalui pelibatan masyarakat dan transparansi pembangunan, lingkungan cerdas melalui energi baru terbarukan, waste management system, serta bangunan cerdas merupakan upaya-upaya sistematis dalam peningkatan kinerja dimensi efficiency dan justice.

Pembangunan IKN untuk Masyarakat

Pengembangan IKN yang berorientasi hanya kepada kelompok masyarakat kelas atas dan para aparatur pemerintahan pusat akan menciptakan kota yang eksklusif dan cenderung menimbulkan ketimpangan baru. Kehadiran IKN di Kalimantan harus menjadi tempat tumbuh kembangnya seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali menuju masyarakat yang maju dan cerdas. Mengembangkan sekat-sekat sosial dan golongan pada kawasan tertentu sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kota yang eksklusif akan cenderung tidak berkembang dan hanya menjadi tempat bekerja pada saat-saat hari kerja.

Transformasi bermukim perlu di kaji secara komprehensif untuk merumuskan tahapan pembangunannya dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Pembangunan inklusif menggambarkan respon terhadap pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, yang cenderung menguntungkan kelompok elit dan mengabaikan kepentingan kelompok miskin, marjinal, dan minoritas (Eka Noor, 2018). Hal ini mengakibatkan ketidaksejahteraan dalam akses pelayanan, penurunan kualitas pembangunan manusia, dan dapat menciptakan eksklusi sosial serta menyebabkan gejala disintegrasi bangsa dalam jangka panjang. Pengembangan hunian yang berpagar dengan sistem akses green fingers di kawasan akan berdampak kepada pengkotak-kotakan dan segregasi ruang dan sosial. Pembangunan ruang sosial dan terintegrasi hanya untuk sekelompok masyarakat akan menciptakan kecemburuan sosial dan berkembangnya faham radikalisme akibat rasa ketidakadilan. Mengelompokkan hunian ASN tanpa berinteraksi dengan masyarakat akan mereduksi sifat pelayanan dari aparatur itu sendiri. Mengkotak-kotak hunian berdasarkan jabatan akan berdampak kepada segregasi sosial dan mengurangi kohesi sosial.

Perlu menciptakan ruang-ruang sosial dan pejalan kaki tidak hanya secara fisik namun mampu menciptakan komunitas perkotaan yang berperan dalam menghidupkan kota. Komunitas berperan dalam pembangunan kota, bukan hanya sekedar objek dalam pembangunan. "Cities have the capability of providing something for everybody, only when they are created by everybody". - Jane Jacob (Erland, 2021). Jane Jacobs, seorang jurnalis Amerika Serikat, mengingatkan kita bahwa kota seharusnya dibangun untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua warganya dan sebagai ruang partisipasi bagi semua pihak dalam proses pembangunannya. Pembangunan IKN dilakukan seharusnya disusun berdasarkan rencana pengalokasian ruang untuk setiap kegiatan sebagai scenario untuk mencapai tujuan kota yang inklusif, adaptif, layak huni, dan berkelanjutan.

Perencanaan dan desain kota yang terlalu mengandalkan pertimbangan teknis dan matematis cenderung menciptakan lingkungan kehidupan yang kering, tidak bersifat manusiawi, dan kehilangan identitas. Pendekatan perencanaan dan desain kota yang "humanistis" menekankan penekanan pada modal sosial yang sudah ada. Jacobs menggambarkan konsep ini saat mengungkapkan bahwa kepadatan jaringan sosial yang tinggi di permukiman urban yang lebih tua, bersamaan dengan keberagaman penggunaan

lahan dapat dianggap sebagai modal sosial yang mendukung tingkat keamanan umum (Purwanto, 2012).

Pembangunan hunian di IKN harus juga representasi dari harapan bangsa serta perwujudan norma hukum yang berlaku. Pancasila merupakan dasar norma hukum paling dasar khususnya pada sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang peraturan terkait perumahan rakyat harus mempertimbangkan hak dan kepentingan rakyat Indonesia, termasuk mereka yang dari kalangan atas, menengah keatas, menengah kebawah dan dari masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut harus dilakukan secara adil dan merata, terutama dalam penyediaan tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan.

Menurut (Doxiadis, 1968) dalam teori permukiman dideskripsikan bahwa permukiman adalah sistem yang terdiri dari lima elemen, yaitu: alam, manusia, masyarakat, lingkungan dan jaringan. Pengembangan IKN tidak bisa diartikan secara sempit sebagai kawasan modern dengan fasilitas-fasilitas mewah, namun juga sebagai wadah transformasi masyarakat dari kondisi saat ini menjadi masyarakat yang maju dan cerdas.

Kesimpulan

Pengembangan IKN merupakan pekerjaan besar pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kinerja pemerintah melalui transformasi budaya kerja dan penyediaan fasilitas yang representatif bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pemindahan IKN merupakan bentuk pemerataan pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsep Pemindahan IKN yang dirancang oleh pemerintah, berkolaborasi dengan para pakar dan ahli, telah merumuskan konsep pendekatan ibu kota negara menyesuaikan dengan harapan dan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kota masa depan yang menjadi model percontohan pengembangan perkotaan di Indonesia di masa depan.

Namun, konsep pengembangan yang dirumuskan masih terlalu fokus kepada pengembangan kawasan secara fisik dan cenderung dangkal dalam melakukan elaborasi terhadap isu dan permasalahan yang ada. Kita perlu mendukung pengembangan IKN dengan harapan terwujudnya suatu kawasan yang modern, dengan dukungan fasilitas berbasis teknologi mutakhir sebagai representasi kemajuan bangsa di mata dunia dan regional. Namun, grand desain kawasan tidak boleh mengesampingkan prinsip dasar dan tujuan pemindahan ibukota negara sebagai cita-cita besar berbangsa dan bernegara. Pembangunan IKN perlu dilakukan sebagai bentuk transformasi bernegara dan berbudaya secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perekonomian bangsa.

Pembangunan IKN secara transformatif merupakan perwujudan pengembangan kawasan dengan menempatkan manusia sebagai faktor utama. Pengembangan IKN perlu dilakukan secara humanistik tanpa mengabaikan perlunya dukungan infrastruktur cerdas,

hunian yang cerdas, dan penerapan teknologi termutakhir. Pengembangan IKN sebagai antithesis dari perkembangan kota-kota di Indonesia yang berkembang cenderung menciptakan segregasi ruang dan sosial. Kota-kota berkembang dengan dipengaruhi globalisasi dan arus modal yang sangat kuat sehingga menciptakan kesenjangan antar masyarakat semakin dalam. Pengembangan IKN perlu dikembangkan secara inklusif tanpa membedakan kelompok dan golongan, baik yang miskin maupun kaya.

IKN sebagai representasi kemajuan bangsa harus memperhatikan kondisi riil masyarakat yang mayoritas masih hidup dalam kemiskinan dan terbelakang. IKN harus bisa diakses semua kelompok untuk bertransformasi bersama-sama menuju masyarakat yang cerdas dan maju. Transformasi bernegara dan berbudaya perlu diwadahi di kawasan IKN untuk menciptakan kemakmuran dan kemajuan bersama. IKN yang menjadi model masa depan pengembangan kota-kota di Indonesia perlu berorientasi kepada inklusifitas sebagai wadah menuju transformasi bersama menuju kepada kemajuan. Model pembangunan IKN akan diadopsi di seluruh kota-kota di Indonesia secara transformatif menuju cita-cita kemajuan bangsa menuju 2045. Indikatornya cukup jelas, apakah pembangunan IKN dapat menjadi model pembangunan perkotaan yang inklusif bagi kemajuan bangsa untuk diadopsi bagi kota-kota lainnya. IKN yang eksklusif hanya akan membebani anggaran pemerintah secara jangka pendek dan menciptakan kesenjangan pada jangka panjang yang berdampak kepada disintegrasi dan kerawanan sosial lainnya.

Pemodelan hunian sebagai unsur utama pembentukan kota dan menjadi faktor pembentuk kemajuan kota perlu dikaji lebih mendalam sehingga dapat menjadi model dan diadopsi sebagai pengembangan lingkungan hunian di kota-kota seluruh nusantara. Pembangunan perkotaan dan lingkungan hunian yang cenderung mengalami segregasi dan ketimpangan menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat di masa mendatang. Pengembangan hunian di kawasan inti IKN dan di kawasan penyangga lainnya perlu menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh kepada keberlanjutan perkembangan kota tersebut. Perlu dilakukan kajian yang komprehensif transformasi bermukim berdasarkan kondisi riil masyarakat dan perkembangan kehidupan berbangsa serta bernegara secara jangka panjang

Daftar Pustaka

- Ayundari. (2022). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara*. Kemenkeu. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>
- Bestari, N. P. (2023). *Internet Indonesia Paling Lelet di Asia Tenggara*. CNBC Indonesia. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230328065744-37-424983/internet-indonesia-paling-lelet-di-asia-tenggara>

- BPS. (2022). *Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (unit) di Provinsi DKI Jakarta 2020-2022*. BPS Provinsi DKI Jakarta. Diakses dari <https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-provinsi-dki-jakarta.html>
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Castells, M. (1994). *Technopoles of the World: The Making of 21st Century Industrial Complexes*. Routledge & CRC Press.
- Doxiadis, K. A. (1968). *Ekistics: an introduction to the science of human settlements*. (No Title).
- Eka Noor, Y. (2018). *Membangun Kota Inklusif, Meraih Kenyamanan Tinggal bagi Warga – Lembaga Ombudsman DIY*. Diakses dari <https://ombudsman.jogjaprov.go.id/membangun-kota-inklusif-meraih-kenyamanan-tinggal-bagi-warga/>
- Erland, A. K. (2021). *Humans of Urbanism: Jane Jacobs*. Medium. Diakses dari <https://medium.com/the-urban-condition/humans-of-urbanism-jane-jacobs-bd34380992ec>
- Hidayat, M. F., Saputro, A. N., & Maula, B. F. (2018). *Diagnosis Pertumbuhan Indonesia: Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Hutasoit, W. L. (2019). Analisa pemindahan ibukota negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2), 108-128. <https://doi.org/10.31293/ddk.v39i2.3989>
- IMD, W. D. C. (2023). *Peringkat Daya Saing Digital Dunia 2023 – Sekolah bisnis IMD untuk kursus manajemen dan kepemimpinan*. Diakses dari <https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/>
- Kelly, J. (2020). The City Sprouted. *Consilience*, (22), 73-85.
- Kemendes. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2021>
- Kominfo. (2019). *Ibu Kota Negara Pindah ke Wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20899/ibu-kota-negara-pindah-ke-sebagian-penajam-paser-utara-dan-sebagian-kutai-kartanegara/0/berita>
- Kurnia, E. (2023). *Menguji Kandungan Logam Berat Air Sungai Jakarta (1)*. kompas.id. 22 Sep 2023. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/09/22/menguji-kandungan-logam-berat-air-sungai-jakarta-1>

- Lynch, K. (1984). *Good City Form*. MIT Press.
- Nuryakin, C., Susanti, H., Rezki, J. F., Revindo, M. D., & Dartanto, T. (2023). *White Paper Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029*. LPEM - FEB - UI. Diakses dari <https://www.lpem.org/id/white-paper-dari-lpem-untuk-indonesia-arrah-ekonomi-dan-masyarakat-2024-2029/>
- Purnama, S. J., & Chotib, C. (2023). Analisis kebijakan publik pemindahan ibu kota negara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 153-166. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>
- Purwanto, E. (2012). *Relasi Rancangan Kota dan Anarki Warga*. Institutional Repository (UNDIP-IR).
- Siswanto. (2017). *Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan*. Diakses dari <https://123dok.com/document/yngr5nmp-transformasi-pancasila-identitas-keindonesiaan-transformation-pancasila-indonesian-identity.html>
- Sulistyono. (2022). Kerugian Ekonomi Dan Lingkungan Sebagai Dampak Kemacetan Transportasi Kendaraan Bermotor Pengguna Bbm Fosil. *Swara Patra: Majalah Ilmiah PPSDM Migas*, 12(2), 12-21. <https://doi.org/10.37525/sp/2022-2/274>